



# RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK)



TAHUN 2019  
**DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN BULELENG**



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



[dinsos@bulelengkab.go.id](mailto:dinsos@bulelengkab.go.id)



(0362) 21248

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 02 Januari 2019.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



**I Gede Sandhivasa, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650704 198602 1 009

**DAFTAR ISI**

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng .....	2
1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja.....	3
<b>BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	5
2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama .....	10
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>12</b>
<b>LAMPIARAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi padahasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagimasyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untukmemerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalahpemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namunmembutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsisecara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlumengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai denganbatasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintahjuga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita

Karena melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## 1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Penetapan Peraturan Bupati ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

- Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  1. Sekretaris terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
    - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
    - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
    - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
  3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
    - a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
    - b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga

- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin
  - c. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial
5. UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan
  - b. Kepala Tata Usaha UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan

### **1.3 Tujuan Indikator Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja**

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public

- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel Sedangkan tujuan khususnya adalah :
  - a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
  - b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
  - c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
  - d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
  - e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



## BAB II

### RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 dalam pencapaian Misi 1 yaitu :

Tabel 2.1.1

#### Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>VISI</b> : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>			
<b>MISI I</b> : Memantapkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.</li> <li>• Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial.</li> <li>• Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.</li> </ul>

Tabel 2.1.2

## Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.	Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	5,8%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial .	Sosial	Dinsos
	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.	Peningkatan upaya pemberdayaan n fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,28%	20,5%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Dinsos
						Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Sosial	Dinsos

## A. Strategi Dan Arah Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022, sebagai berikut :

### 1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara optimal yaitu : **Peningkatan Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan usaha ekonomi bagi PMKS**, meliputi :

- a. Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.
- b. Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
- d. Menyelenggarakan perlindungan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial.

### 2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan.

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi PMKS*** melalui meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. ***Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS/Masyarakat miskin*** melalui Penggalan dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
3. ***Meningkatkan potensi sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme*** melalui meningkatkan dan memperkuat nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam memantapkan revolusi mental bagi generasi muda dan masyarakat .

Tabel 2.1.3

## Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.	Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial .
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan PSKS dalam Penanganan PMKS.	Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan peran aktif dan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap PMKS sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial .
Meningkatnya Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.	Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Meningkatkan potensi dan sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

## 2.1 Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja).

## BAB IV

### PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai pertriwulan tahun 2019. Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Singaraja, 02 Januari 2019.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



**I Gede Sandhivasa, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650704 198602 1 009



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	a. Persentase PMKS yang tertangani.	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%						
		b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3,85%	7,70%	11,55%	15,40%						
II	Meningkatnya efektifitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%						
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	49.300.000	Dinas Sosial	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayarkan	236.000.000	Dinas Sosial	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis kendaraan yang disewa	247.000.000	Dinas Sosial	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnnya	9.000.000	Dinas Sosial	
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dan jenis laporan keuangan yang disusun	281.400.000	Dinas Sosial	
								Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah lingkungan kantor yang terpelihara	138.016.000	Dinas Sosial	
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40.835.000	Dinas Sosial	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	17.740.000	Dinas Sosial	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan kantor yang memadai	10.000.000	Dinas Sosial	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	48.075.000	Dinas Sosial	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000	Dinas Sosial			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	23.202.000	Dinas Sosial
								Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah kali koordinasi dilaksanakan	114.895.000	Dinas Sosial
								Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	178.655.000	Dinas Sosial
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional kantor tersedia	30.000.000	Dinas Sosial
								Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang memadai	20.000.000	Dinas Sosial
								Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	2.600.000	Dinas Sosial
								Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang memadai	12.500.000	Dinas Sosial
								Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan	122.500.000	Dinas Sosial
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman	18.000.000	Dinas Sosial
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	68.000.000	Dinas Sosial
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang memadai	35.000.000	Dinas Sosial
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian diadakan	9.982.000	Dinas Sosial
								Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah jenis pakaian diadakan	9.000.000	Dinas Sosial
								Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan	45.000.000	Dinas Sosial
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun	98.500.000	Dinas Sosial
							Program Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun	195.000.000	Dinas Sosial
							Program Informasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan	45.000.000	Dinas Sosial
							Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan Petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah pendamping sosial yang meningkat pemahaman dan keterampilannya tentang PMKS	82.500.000	Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pelatihan keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang meningkat keterampilannya dalam bidang usaha ekonomi produktif	292.500.000	Dinas Sosial
								Pelatihan keterampilan begi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang terampil dalam usaha	130.000.000	Dinas Sosial
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Cakupan pelayanan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.	36.300.000	Dinas Sosial
								Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS dan Korban Napza yang meningkat pemahamannya tentang KIE.	24.200.000	Dinas Sosial
								Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat , anak nakal	Jumlah Anak Nakal yang meningkat keterampilannya dan mandiri.	95.000.000	Dinas Sosial
								Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mandiri	434.500.000	Dinas Sosial
							Program Pembinaan Anak Terlantar	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang meningkat keterampilannya dan mandiri.	220.000.000	Dinas Sosial
								Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	Jumlah data analisis permasalahan anak terlantar	30.000.000	Dinas Sosial
							Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo	Jumlah penghuni Panti yang mendapat pelatihan	21.500.000	Dinas Sosial
								Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	Jumlah Pengelola panti yang mendapat peningkatan kualitas pelayanan.	115.500.000	Dinas Sosial
								Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni Panti Asuhan/Jompo	Jumlah Panti Asuhan yang meningkat keterampilannya dalam bidang usaha kesejahteraan sosial.	63.000.000	Dinas Sosial
							Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks Narapidana yang meningkat keterampilannya dan mandiri.	55.650.000	Dinas Sosial
								Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, Waria, WTS, ODGJ, ODHA, Korban Napza) yang mandiri.	139.350.000	Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah dunia usaha yang meningkat partisipasinya dalam masyarakat	90.000.000	Dinas Sosial
								Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat .	Jumlah Suka Duka yang mandiri	50.000.000	Dinas Sosial
								Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat yang aktif	100.000.000	Dinas Sosial
							Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah generasi muda yang meningkat pemahamannya tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	467.860.000	Dinas Sosial
								Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan	Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan dalam kondisi baik	157.140.472	Dinas Sosial
								Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara	756.999.528	Dinas Sosial
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Jumlah mayat terlantar yang di semayamkan dengan baik dan layak. Orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal	185.000.000	Dinas Sosial
								Pemutakhiran data penduduk miskin (PMKS) dan PSKS Lainnya	Jumlah data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diverifikasi dan validasi	288.800.000	Dinas Sosial
								Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	Jumlah PKH yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), jumlah keluarga miskin yang memperoleh sistem jaminan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan jumlah keluarga miskin yang mendapat jaminan sosial/santunan kematian	392.000.000	Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Pembinaan Para Penyandang disabilitas dan Trauma	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma	Jumlah Penyandang disabilitas yang terampil di bidang usaha	101.500.000	Dinas Sosial
								Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mandiri.	483.500.000	Dinas Sosial

Singaraja, 02 Januari 2019.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



**I Gede Sandhivasa, S.Sos. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650704 198602 1 009